

SIARAN PERS
HASIL SIDANG UMUM KE-27
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ORGANIZATION (AIPO),
CEBU CITY, FILIPINA, 10 – 15 SEPTEMBER 2006

Sidang Umum ke-27 *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) telah berhasil menyepakati rekomendasi yang dihasilkan oleh *Ad-Hoc Committee* untuk melakukan transformasi AIPO menjadi suatu institusi yang lebih efektif dan terintegrasi melalui beberapa keputusan yakni melakukan perubahan nama AIPO menjadi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan membuat amandemen terhadap Statuta AIPO.

Perubahan nama ini merupakan inisiatif Delegasi DPR RI yang patut dianggap sebagai salah satu keberhasilan diplomasi parlemen Indonesia. Delegasi DPR RI, dalam Sidang yang dibuka secara resmi oleh H.E. Jose de Venecia, Jr., Ketua Parlemen Filipina selaku Presiden AIPO tersebut, dipimpin oleh Ketua DPR RI Bpk. H. R. Agung Laksono serta didampingi oleh 14 anggota delegasi lainnya. Sidang Umum ke-27 AIPO ini diselenggarakan pada 10-15 September 2006 di Cebu City, Filipina. Sidang dihadiri oleh para anggota parlemen dari 8 Negara Anggota AIPO (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), 2 negara Peninjau Khusus (Brunei Darussalam dan Myanmar), dan 9 negara mitra dialog AIPO (Australia, Kanada, China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Papua Nugini dan Federasi Rusia dan Parlemen Eropa). Sidang ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa komisi diantaranya *Committee on Women of AIPO Matters*, *Committee on Political Matters*, *Committee on Economic Matters*, *Committee on Social Matters*, *Committee on Organizational Matters* dan *Committee on Dialogue with Observer Countries*.

Selain menyepakati perubahan nama AIPO menjadi AIPA, Sidang Umum kali ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya mendorong pemerintah dan parlemen negara-negara ASEAN menerapkan sistem pendidikan yang menganut kesetaraan jender, mendorong para pemimpin ASEAN meningkatkan kegiatan *interfaith dialogue* termasuk dalam hal ini peningkatan peran media dalam menjembatani dialog tersebut. Selanjutnya Sidang juga mendukung kerjasama dalam mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN termasuk di dalamnya mendorong upaya peningkatan kerjasama dalam bidang *Free Trade Area*, dan mendukung peningkatan efektivitas kerjasama pemberantasan perdagangan wanita dan anak. Di dalam Sidang ini pula telah disahkan 31 resolusi yang masing-masing terkait dengan bidang politik (6 resolusi), bidang ekonomi (5 resolusi), bidang sosial budaya (5 resolusi), dan bidang organisasi (11 resolusi) serta 4 resolusi dalam bidang WAIPO.

Pada Sidang Umum AIPO kali ini, Delegasi DPR RI juga berhasil memperjuangkan pengesahan resolusi mengenai situasi di Timur Tengah khususnya di Palestina dan Libanon. Resolusi ini merupakan suatu terobosan AIPO untuk mulai membahas kasus-kasus sensitif yang sebelumnya tidak pernah disinggung dalam sidang-sidang terdahulu. Indonesia dalam kesempatan ini juga mengangkat 2 isu penting lainnya menyangkut

situasi terakhir pelaksanaan demokrasi di Myanmar dan usulan *Multilateral Extradition Treaty* namun 2 isu yang diusulkan tersebut belum dapat disepakati secara konsensus untuk dimasukkan menjadi agenda pembahasan.